KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 4 4 8			H.4 X Final		
		H.2 X Pembetulan Ke-	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 8 5 2 6 4 8 1 9 5 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : RADEN RORO RANI MEITA PRATIWI SUBAGYONO							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1	21-402-01	6.453.500	6.453.500	0	5	322.675	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 19							
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 уууу							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
	nnsi Pemerintah :	9 5 3 3 5	16 2 722	0 0 0			
	nsi Pemerintah :		RAH ATMA HUSADA MAHAK	AM PROVINSI KA	LIMANTAN	TIMUR	
C.3 ID Subunit	Organisasi :					7	
C.4 Tanggal	:	2 6 dd 0 1 mm	2 0 2 2 уууу		•	_	
C.5 Nama Penandatangan : HARI JUMADI							
C.6 Pernyataan	Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan b tandatangani secara elektronik	pahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah sa	ya isi dengan	benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	c mengatur bahwa do	kumen ini tel	ah ditandatangani secara	

5KTFIDZ7